



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Anggarkan Kunjungan Luar Negeri Rp 343,5 Miliar
Tanggal : Rabu, 30 Agustus 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 1

DPR ANGGARKAN KUNJUNGAN LUAR NEGERI RP 343,5 MILIAR

Total anggaran kunjungan ke luar negeri naik 70 persen.

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat berencana menaikkan anggaran kunjungan kerja luar negeri mereka dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018. Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp 343,5 miliar—naik sekitar Rp 141,8 miliar atau 70 persen dari anggaran tahun ini sebesar Rp 201,7 miliar.

Berdasarkan dokumen tentang tambahan dalam pagu anggaran dan penyelesaian rencana kerja DPR tahun 2018 tertulis penambahan anggaran perjalanan kerja luar negeri Dewan. Untuk perjalanan dinas luar negeri nilainya Rp 246,6 miliar dan program penguatan kelembagaan dalam bentuk pelaksanaan kerja sama internasional sebesar Rp 96,9 miliar.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Agung Budi Santoso, menuturkan, kenaikan nilai anggaran itu merupakan akumulasi dari dana kunjungan kerja pada

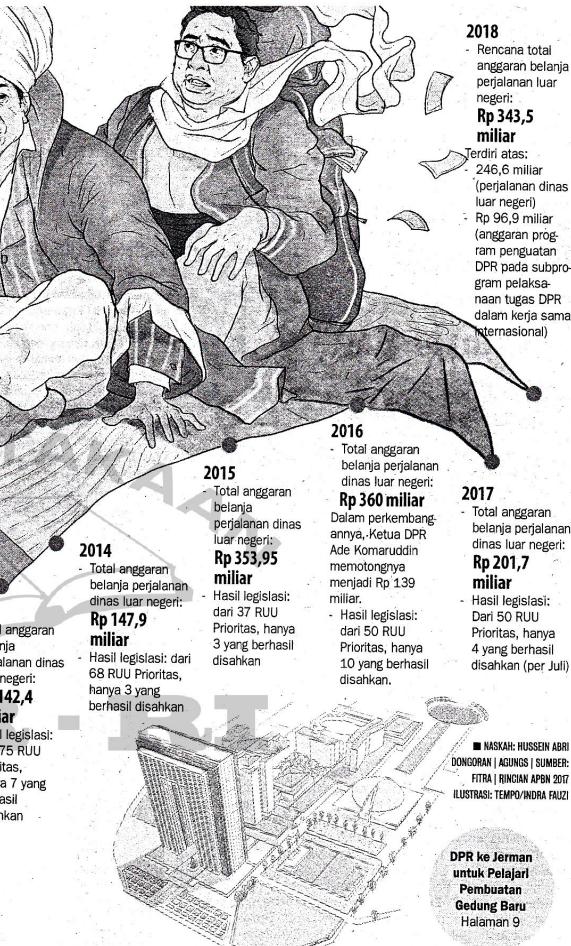
2016 yang sempat dipotong karena ada moratorium kunjungan kerja luar negeri yang dulu tidak boleh, sekarang boleh," ujarnya di DPR kemarin. Kenakan anggaran itu juga untuk menyesuaikan dengan biaya hotel dan tiket pesawat yang naik.

Ade Komaruddin memang sempat melakukan moratorium kunjungan kerja Dewan ke luar negeri saat dia menjabat Ketua DPR untuk mengtantikani Setya Novanto tahun lalu. Alasannya, selain untuk penghematan, moratorium untuk meningkatkan kinerja legislasi anggota Dewan.

Anggaran yang semula Rp 360 miliar terpangkas menjadi Rp 139 miliar. Kinerja legislasi Dewan juga melonjak. Pada tahun itu, sejumlah undang-undang berhasil disahkan, padahal satu tahun sebelumnya Dewan hanya berhasil mengesahkan tiga undang-undang. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Pada akhir

November 2016, Ade terpilih Setya Novanto kembali menduduki kursi Ketua DPR dan selanjutnya mencabut moratorium kunjungan Dewan ke luar negeri.

Agung berdalah bahwa kunjungan ke luar negeri penting dilakukan oleh anggota Dewan sebagai salah satu sarana mereka memperoleh masukan dalam



pembahasan rancangan undang-undang. "Dalam membuat undang-undang, perlu kunjungan ke luar negeri," kata dia. "Itu kebutuhan dan merupakan hasil rapat dengan alat kelengkapan Dewan serta komisi."

Politikus Partai Amanat Nasional, Ahmad Bakri, yang juga mantan anggota BURT, setuju atas kenaikan

anggaran itu. Ia yakin kunjungan ke luar negeri akan meningkatkan produk legislasi. "Kami perlu mencari referensi perbandingan," ujarnya. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sepakat dengan Bakri. "Kunjungan kerja luar negeri banyak aspek manfaatnya," ujarnya. Sekretaris Jenderal

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yenny Sucipto, mengatakan kenaikan anggaran kunjungan kerja ini sangat jangkal karena mendekati pemilihan umum legislatif. "Mereka butuh tambahan untuk kampanye, dari dana kunjungan kerja yang lumsum," ujarnya.

• HUSSEIN ABRI DONGORAN | AGUNG S

2018
- Rencana total anggaran belanja perjalanan luar negeri:
Rp 343,5 miliar
Terdiri atas:
- 246,6 miliar (perjalanan dinas luar negeri)
- Rp 96,9 miliar (anggaran program penguatan DPR pada subprogram pelaksanaan tugas DPR dalam kerja sama internasional)

2016
- Total anggaran perjalanan dinas luar negeri:
Rp 360 miliar
Dalam perkembangannya, Ketua DPR Ade Komaruddin memotongnya menjadi Rp 139 miliar.
- Hasil legislasi:
dari 50 RUU Prioritas, hanya 4 yang berhasil disahkan

2017
- Total anggaran perjalanan dinas luar negeri:
Rp 201,7 miliar
- Hasil legislasi:
Dari 50 RUU Prioritas, hanya 4 yang berhasil disahkan (per Juli)

■ MASKAH: HUSSEIN ABRI
DONGORAN | AGUNG | SUMBER:
FITRA | RINGKAN APBN 2017

ILLUSTRASI: TEMPO/INDRA FAUZI

DPR ke Jerman untuk Pelajaran Pembuatan Gedung Baru
Halaman 9